

PENDAMPINGAN MANAJERIAL PENGELOLAAN BUMG SEPAKAT JAYA DI BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE

Dasmi Husin^{1*}, Hilmi², Muhammad Yusuf³, dan Nurmila Dewi⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

*Email : dasmihusin@pnl.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dari sisi manajemen dan keuangan. Memasuki tahun lima penerapan Undang-Undang Desa, operasional BUMG masih juga terlihat belum terlalu maksimal. Beberapa masalah mendera manajemen BUMG diantaranya komunikasi antara pengurus dengan aparatur, manajemen resiko, studi kelayakan, dan pengelola tidak memiliki perencanaan bisnis (*bisnis plan*). Kegiatan ini dilaksanakan di desa Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif. Personal yang sebagai mitra adalah para pengelola /pengurus BUMG Sepakat Jaya. Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini melatih pengetahuan dan ketrampilan pengelola BUMG mengenai manajerial dan kinerja usaha yang baik untuk BUMG. Kegiatan pengabdian ini mendukung maksud dan tujuan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan kemadirian desa dalam mencari sumber-sumber pendapatan diluar transfer dana desa.

Kata kunci : Pengelolaan, keuangan, Badan, Usaha, Milik, Desa

PENDAHULUAN

Mencermati tiga tahun (2015-2018) penyaluran dana gampong (ADG) banyak kemajuan terlihat dalam pembangunan desa. Pada prinsipnya pengelolaan dana desa perlu dikelola secara hati-hati. Pengelolaan dana desa yang tidak mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik akan menghadapi masalah besar. Tidak hanya bermasalah dengan hukum, tetapi juga bermasalah dengan konflik. Antara aparatur desa, forum desa, dan masyarakat sering terjadi *miss communication* dan kontak pisik.

Saat ini dana di desa melimpah. Banyak pihak mempertanyakan bahwa apakah dengan adanya dana tersebut desa dapat berkorelasi positif dengan kemakmuran warga. Bahkan di beberapa desa mulai kebingungan menggunakan dana desa. Jika dulu dana tersebut lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kini sejumlah prasarana telah siap dan telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu dibidang apa lagi yang harus didanai dan dikerjakan?

Jika ditelisik lebih dalam, masih banyak masalah lain yang perlu penanganan segera. Misalnya pengangguran pemuda, sosial, budaya, dan peningkatan perekonomian masyarakat. Untuk membiayai hal tersebut, desa sangat membutuhkan dana yang besar. Mengandalkan pnerimaan dari transfer dana desa tentu saja tidak cukup. Aparatur desa harus mencari alternatif lain yang dapat menambah pendapataan asli desa. Pemerintahan desa perlu menggali potensi desa. Mencari sumber penghasilan dengan mengelola sumber daya guna memperoleh sumber pendapatan lain selain transfer dana desa. Agar lebih terfokus pekerjaan ini tentu harus terpisah manajemen operasionalnya dengan dengan pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintahan desa perlu mendirikan unit usaha milik desa.

Menyikapi hal tersebut hampir seluruh desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didukung oleh pemerintah. Melalui pemerintah memang menginstruksikan adanya satu perusahaan per satu desa. Setiap desa memiliki paling kurang satu entitas usaha yang mampu beroperasi dan berkontribusi untuk

memberikan peningkatan kesejahteraan warga. Perusahaan tersebut dapat memanfaatkan potensi desa, masyarakat desa sebagai pengelola, dan hasilnya juga dapat menambah pendapatan asli desa.

Membangun BUMDes yang kuat sangat tergantung pada kesiapan sumber daya dan perencanaan yang matang. Setiap penggunaan dana desa harus tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana operasional. Awalnya BUMDes memang perlu diberikan modal awal untuk menggerakkan operasional perusahaan. Subsidi dana yang diambil dari alokasi dana desa tersebut perlu pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Terutama menyangkut pemisahan operasional dan kepemilikan antara aparatur desa dengan manajemen BUMDes. Selain itu juga menyangkut dengan hak pengendalian, kewajiban pengelolaan memenuhi unsur transparan dan akuntabel.

Kenyataannya banyak BUMDes sampai saat ini masih saja menuai masalah. Keinginan untuk maju, tumbuh, dan berkembang selalu terhambat dengan permasalahan tumpang tindih pekerjaan antara manajemen pengelolaan BUMDes dengan aparatur desa. Belum lagi masalah dengan pemilihan jenis usaha, orientasi pasar, respon dari masyarakat yang negatif, dan lemahnya kapabilitas pengelola. Seringkali aparatur desa tidak melakukan sudi kelayakan usaha lebih awal dalam menentukan jenis usaha sehingga badan usaha tersebut sulit berkembang. Bukannya menghasilkan pendapatan, malah menimbulkan biaya operasional yang tinggi sehingga menjadi beban baru bagi desa.

Selain itu banyak BUMDes tidak mampu menyusun cash flow, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Mengelola sebuah entitas bisnis tentu penguatan administrasi dan keuangan perlu diperhatikan. Keinginan mendirikan BUMDes merupakan hal yang sangat positif, tetapi keinginan dan kemampuan pendanaan saja tentu tidak cukup. Potret buram kemajuan BUMDes seperti ini sampai saat ini belum mampu diatasi.

Banyak pihak berharap tenaga pendamping desa bersedia memfasilitasi pendirian BUMDes. Dari penyiapan pendirian sampai proses pengelolaan manajerial usaha. Kenyataannya eksistensi BUMDes bukanlah bagian pekerjaan dari para tenaga lapangan tersebut. Disini yang diperlukan adalah adanya pembinaan dari pihak lain seperti pemerintah, akademisi, atau lembaga swadaya masyarakat. Pendampingan manajerial atas pengelolaan BUMDes agar pendirian dan laju usahanya lebih kuat.

Salah satu desa yang memerlukan pendampingan manajerial BUMDes adalah desa Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe. Desa ini telah mendirikan BUMDes yang diberi nama Sepakat Jaya. Eksistensi BUMDes di desa itu lebih dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sehingga nama BUMDes Sepakat Jaya sekarang berganti menjadi BUMG Sepakat Jaya. Setiap penerimaan dan penggunaan dana, bendahara selalu melaporkan ke aparatur desa dan dinas pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Sayangnya, setiap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tidak dicatat sesuai standar akuntansi yang baku. Bendahara BUMG Sepakat Jaya tidak memiliki format yang standar untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan akuntansi lainnya. Pencatatan dilakukan secara otodidak karena selama ini belum pernah mendapat bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan, manajemen, dan pembinaan BUMG lainnya.

Desa Mesjid Peunteut merupakan salah satu desa dalam wilayah kota Lhokseumawe. Pesatnya pembangunan dan banyaknya rumah penduduk, menjadikan BUMG Mesjid Peunteut lebih kreatif mengelola unit usahanya. Merasa usahanya berjalan dengan baik, BUMG Sepakat Jaya desa Mesjid Peunteut ingin mengembangkan usahanya dengan cara memilih sektor ril. Tanpa melakukan studi kelayakan usaha

dan survey pasar, manajemen BUMG ini yakin bahwa rencana ini akan berhasil dan akan menghasilkan provit yang lebih besar.

Seperti diketahui berbagai permasalahan mendera pengelolaan BUMDes di Indonesia. Saat ini sangat diperlukan pembinaan dan penguatan kapasitas dari berbagai pihak. Banyak hal yang perlu di benah seperti masalah produktivitas, manajemen operasional, keuangan dan akuntansi, pengendalian kualitas, dan marketing. Termasuk juga analisis studi kelayakan usaha terhadap rencana unit usaha yang baru. Tanpa melakukan analisis seperti hal tersebut diatas, diyakini unit usaha akan mendapatkan banyak masalah.

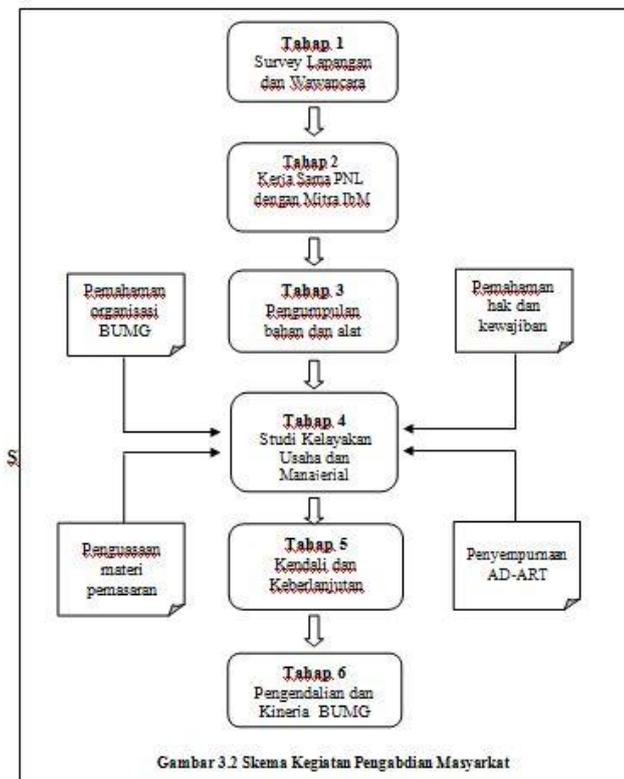
METODE PELAKSANAAN

Sebagai khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pengelola BUMG Sepakat Jaya Desa Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat – Lhokseumawe sebanyak lima orang peserta yang dipimpin oleh Bapak Musdan. Pemilihan desa ini didasari pada keputusan pembinaan desa binaan kampu Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Metode ceramah atau orasi
2. Metode demonstrasi
3. Metode praktek langsung

Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada skema 3.1 dibawah ini :



Setelah selesai kegiatan pengabdian masyarakat, instruktur melakukan evaluasi kegiatan baik kegiatan berhubungan dengan kemampuan mitra binaan maupun kegiatan yang telah dikerjakan secara keseluruhan. Tim instruktur dari Politeknik Negeri Lhokseumawe melakukan evaluasi pelaksanaan program yang menekankan pada upaya keberlanjutan program (*sustainable program*).

Pelatihan dibagi kedalam tiga tahap, yaitu:

1. Diberikan ilmu pengetahuan menggunakan metode ceramah dan diskusi mulai dari motivasi, pengelolaan BUMG, pembahasan AD-ART, administrasi keuangan sampai penentuan pasar hasil BUMG. Instruktur memberi pengenalan masalah dan tinjauan pentingnya integritas dan komunikasi dalam pengelolaan BUMG. Selanjutnya

melatih pengelola BUMG terutama ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala bidang yang ditugaskan.

2. Penelusuran dan persamaan persepsi antara owner pemerintahan desa dengan pengelola BUMG. Tahapan ini akan dilatih cara-cara penyusunan laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas,
3. Instruktur akan menguji kembali studi kelayakan bisnis, Menghitung cost and benefit, pengendalian kualitas output, dan mendiskusikan saluran pemasaran BUMG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Mitra Sebelum Pelatihan

Desa Mesjid Peunteut terletak di Kecamatan Blang Mangat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Letak geografis desa ini tidak begitu jauh dari kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe. Hanya beberapa ratus meter saja dari lokasi kampus. Desanya berada di pinggir jalan raya yakni di jalan Nasional Banda Aceh Medan kawasan Keude Peunteut Lhokseumawe.

Setelah kota Lhokseumawe, *Keudee* Peunteut merupakan pusat perdagangan teramai yang sering dikunjungi warga. Tidak asing lagi ratusan toko-toko dibanjiri dengan barang dagangan. Unit usaha kecil (UKM) tumbuh dengan pesat disini karena area Peunteut merupakan area yang sangat strategis bagi setiap produsen maupun konsumen untuk melakukan transaksi jual beli.

Sama halnya dengan desa lain, desa Mesjid Peunteut juga telah memiliki badan usaha milik desa. Setiap tahunnya desa telah mengalokasikan sejumlah dana untuk menggerakkan operasional Bumdes desa Mesjid Peunteut. Sejak tahun 2014 dana desa telah digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Belakangan telah didirikan BUMG yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti surat pendirian, AD-ART, dan struktur organisasi, dan pengelola. Begitupun, kondisi Bumdes desa Mesjid Peunteut belum sepenuhnya mapan. Masih banyak hal yang perlu diberdayakan. Disatu sisi perusahaan milik orang desa ini berkeinginan tumbuh dan berkembang,

namun disisi lain berbagai keterbatasan baik langsung maupun tidak langsung menjadi faktor penghambat Bumdes ini berkembang.

Beberapa masalah mendasar diantaranya adalah studi kelayakan usaha dan segmentasi pasar. Penjualan berbasis online belum juga terealisasi. Adanya fasilitas internet untuk mendukung segmentasi marketing usaha seperti imooji, survey konsumen melalui google form sampai saat ini belum dilakukan.

Untuk memasuki pasar yang kompetitif, BUMG memang harus menguasai teknik pemasaran digital. Beberapa perangkat bauran pemasaran dan pengelolaan administrasi dan keuangan telah tersedia secara gratis dan online. Saat ini sudah tersedia aplikasi untuk membuat brosur promosi secara elektronik yakni Imooji (<https://imooji.com/#/>). User dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis untuk mempromosikan berbagai keunggulan produknya. Aplikasi Imooji menampilkan gambar-gambar produk disertai barcode yang dapat disebarluaskan melalui media sosial. Link koneksinya terkait langsung dengan owner usaha.

Seperti halnya aplikasi Imooji, Bumdes juga dapat melakukan survey konsumen menggunakan google formulir dan aplikasi pelaporan keuangan SiApik. Aplikasi SiApik bermanfaat untuk menyusun laporan keuangan bagi UMKM seperti BUMG tanpa harus melakukan penjurnalan. Sedangkan google form merupakan media bagi pengelola (owner) untuk dapat berinteraksi langsung dengan konsumen berkaitan dengan tanggapannya terhadap produk yang ditawarkan.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan bimbingan teknis pendampingan manajerial pengelolaan BUMG lebih ditekankan pada pemaparan konsep manajemen, keuangan, dan pemasaran BUMG. Proses pengabdian masyarakat berjalan lancar. Materi utama menyangkut produktivitas Usaha BUMG. Materi ini berkaitan dengan pemaparan keunggulan dan peluang-peluang BUMG dan manajemen resiko sehingga pengurus aktif dan kreatif bertahan dan menciptakan sumber mata pencaharian baru. Topik

selanjutnya menyangkut manajemen operasional BUMG. Instruktur menguatkan konsep pengelolaan manajemen, sistem informasi dan komunikasi, dan manajemen resiko usaha.

Pada tahap terakhir instruktur melakukan evaluasi kegiatan. Peserta dinilai kemampuannya untuk melihat efektivitas keberhasilan kegiatan. Dari hasil tanya jawab (*post test*) diperoleh gambaran bahwa kemampuan peserta telah mencapai 96%. Indikatornya dapat dilihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan konsep - konsep yang telah diajarkan. Beberapa peserta bahkan sudah dapat menjelaskan fungsi koordinasi dan fungsi marketing BUMG. Secara mendasar kemampuan peserta sudah memadai, namun untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam maka diperlukan penguatan lebih lanjut (*intermediate*).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah keterbatasan dana dan waktu penguatan. Disatu sisi mitra ingin melanjutkan pelatihan yang sama, namun disisi lain kegiatan ini mengalami keterbatasan. Keterlibatan mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat jelas. Keinginan mitra untuk maju dan berkembang melalui pendirian BUMG sangat tinggi, namun kendalanya terletak pada pembinaan. Akses untuk mendapatkan penguatan sangat terbatas. Begitupun setiap pengurus tetap beringinan untuk mewujudkan BUMG desa mereka menjadi sebuah unit usaha yang berkembang. Unit usaha yang dapat mensejahterakan warga.

KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan pelatihan pendampingan manajerial pengelolaan BUMG Sepakat jaya di desa Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat – Lhokseumawe telah dilaksanakan dengan baik. Pengelola BUMG setempat antusias dan sangat apresiatif mengikuti kegiatan pengabdian yang dilakukan. Mitra binaan telah memiliki perangkat regulasi seperti AD-ART, struktur organisasi, dan pengelolaan administrasi. Hanya saja BUMG Mesjid Peunteut masih perlu mendapat penguatan manajemen dan perencanaan bisnis.

Saran

1. Untuk menghasikan daya saing tinggi, sudah saatnya BUMG Sepakat Jaya Desa Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat menerapkan sistem kewirausahaan digital dan pengelolaan usaha yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan banyaknya BUMG lain yang memiliki aktivitas dan orientas bisnis yang sama. Bukan tidak mungkin antar BUMG saling merebut pangsa pasar
2. Saat ini sudah tersedia aplikasi untuk membuat brosur promosi secara elektronik yakni imooji, survey konsumen menggunakan google formulir, dan SiApik sebuah aplikasi untuk menyusun laporan keuangan bagi UKM seperti BUMG. Hendaknya BUMG Sepakat Jaya desa Mesjid Peunteut menerapkan tiga aplikasi tersebut untuk dapat mengembangkan usaha BUMG lebih maju lagi kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, 2016. **Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi. Edisi X.**
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.**
- [3] Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang **Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.**
- [4] Qanun Nomor 4 Tahun 2009. **Pemerintahan Gampong.** Kabupaten Aceh Utara
- [5] Undang Undang Republik Indoensia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang **Pemerintahan Aceh.** Banda Aceh : Pemerintah Provinsi Aceh.

- [6] Undang Undang Republik
Indoensia Nomor 6 tahun 2014
tentang **Desa**
http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU_NO_6_2014.PDF
- [7] Unit Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Politeknik
Negeri Lhokseumawe, 2016.
**Panduan Penyusunan Proposal
Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat.**
Lhokseumawe : Politeknik Negeri
Lhokseumawe